

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014-2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

**MARISA NADYA FASSA
B 200 140 370**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MARISA NADYA FASSA

B 200 140 370

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dra. Rina Trisnawati, M.Si, Ph.D, Ak, CA

NIDN. 0624026901

HALAMAN PENGESAHAN.

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2017).

Yang ditulis oleh:

MARISA NADYA FASSA

B 200 140 370

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 25 Oktober 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Rina Trisnawati, Dra., M.Si., Akt, Ph.D, CA.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Dra. Mujiyati, M.Si.

(Anggota 1 Dewan Penguji)

3. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si.

(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Syamsudin, M.M.

NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2018



Penulis

MARISA NADYA FASSA

B 200 140 370

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2017)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage* dan belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2017 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 140 sampel data selama 4 tahun pengamatan. Setelah dilakukan *outlier* sebanyak 10 data sehingga total sampel yang diteliti adalah 130 data. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20 dengan menggunakan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linear berganda dan terakhir uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan kemakmuran dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Kinerja keuangan pemerintah daerah, Ukuran pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage* dan belanja daerah

Abstract

This study aims to provide empirical evidence about the influence of local government's characteristics to the financial performance of local governments which used proxies: local government's size, wealth, level of dependence on central government, leverage and regional spending in district/city area in Central Java Province in 2014-2017. The population in this study is the local government in Central Java Province in 2014-2017 which consists of 29 regencies and 6 cities. The sample of this study was taken by using purposive sampling and obtained a sample of 140 data samples during 4 years of observation. After doing 10 data outliers the total sample of this study reduced to 130 data. The collected data were analyzed using the classic assumption test, then tested the hypothesis using multiple linear regression analysis method and statistical test. The results of this study shows that size of the local government, the level of dependence on the central government and regional spending do not have any influence to the financial performance of local governments, while prosperity and leverage have influence to the financial performance of local governments.

Keywords: Local government financial performance, local government size, wealth, level of dependence on central government, leverage and regional spending

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, praktik akuntansi sektor publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah banyak mendapat perhatian dibanding masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Masdiantini dan Erawati, 2016). Dalam rangka

melakukan upaya konkrit mewujudkan *good governance*, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut Sari (2016), Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya.

Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul karena kurangnya dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017.

Penelitian ini mereplika pada penelitian Aziz (2016) yang menguji Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan tiga variabel independen yaitu Kemakmuran, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dan *Leverage* serta pada penelitian ini peneliti menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2014-2017.

2. METODE

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017. Dengan mengambil sampel sebanyak 35 pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laporan realisasi anggaran dan laporan neraca tahun 2014-2017. Teknik pengambilan

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu.

2.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran dan laporan neraca pemerintah daerah kab/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 yang diperoleh dari BPK perwakilan Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kinerja Keuangan	130	0.016	0.291	0.08223	0.059278
Ukuran Pemerintah Daerah	130	28.110	30.350	28.72692	0.366737
Kemakmuran	130	-.390	0.840	0.25462	0.215224
Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat	130	0.000	3.950	0.62615	0.640142
Leverage	130	0.000	0.080	0.00685	0.010346
Belanja Daerah	130	27.190	28.780	28.09223	0.305582

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan selama periode pengamatan nampak bahwa nilai minimum KK sebesar 0,016 dan nilai maksimum sebesar 0.291 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.08223 dan nilai standar deviasi sebesar 0.059278. Kab/Kota dengan jumlah kinerja keuangan pemerintah daerah yang paling rendah yaitu Kota Tegal pada tahun 2014 dan Kabupaten Brebes pada tahun 2016 yaitu sebesar , efisiensi sebesar 28,11% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut belum dapat menggunakan anggaran yang ada secara semestinya serta masih buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Temanggung pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*Mean*) yang lebih tinggi dari nilai tengah (*median*) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah tergolong memiliki kinerja yang kurang baik karena kurang efisien dengan adanya nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,08223 tersebut.

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki nilai minimum sebesar 29.110 dan nilai maksimum sebesar 30.350 dengan nilai rata-rata (*mean*) UPD sebesar 28.72692 dan standar deviasi sebesar 0,366737. Kab/Kota dengan jumlah rasio ukuran pemerintah daerah yang paling rendah yaitu Kabupaten Purbalingga

pada tahun 2014 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kota Semarang pada tahun 2014. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi dari nilai tengah (*median*) menunjukkan bahwa tingkat ukuran pemerintah daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan kurang baik karena nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28.72692 atau 2,872%.

Variabel Kemakmuran memiliki nilai minimum sebesar -0,390 dan nilai maksimum sebesar 0,840 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,25462 dan nilai standar deviasi sebesar 0,215224. Kab/Kota dengan jumlah rasio Kemakmuran yang paling rendah yaitu Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Brebes pada tahun 2014. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi dari nilai tengah (*median*) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tergolong memiliki kinerja yang kurang baik.

Variabel Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 3,950 dengan nilai rata-rata (*mean*) tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 0,62615 dan nilai standar deviasi sebesar 0,640142. Kab/Kota dengan jumlah rasio tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat paling rendah yaitu Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Batang pada tahun 2014. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi dari nilai tengah (*median*) menunjukkan bahwa ketergantungan Pemda kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi karena nilainya di atas 50% yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 0,62615 atau 62,615% dan tergolong memiliki kinerja yang kurang baik.

Variabel *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum *Leverage* sebesar 0,080 dengan nilai rata-rata (*mean*) *Leverage* sebesar 0,00685 dan nilai standar deviasi sebesar 0,010346. Kab/Kota dengan jumlah rasio *Leverage* yang paling rendah yaitu Kabupaten Batang pada tahun 2014, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Grobogan pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih tinggi dari nilai tengah (*median*) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tergolong memiliki kinerja yang kurang baik karena nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,00685.

Variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar 27,190 dan nilai maksimum sebesar 28,780 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,09223 dan nilai standar deviasi sebesar 0,305582. Kab/Kota dengan jumlah rasio Belanja Daerah yang

paling rendah yaitu Kota Salatiga pada tahun 2014, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kota Semarang pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) yang lebih kecil dari nilai tengah (*median*) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tergolong memiliki kinerja yang baik.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (*Central Limit Theorem*) yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan (McClave et al, 2011:300). Penelitian ini jumlah n sebesar $140 > 30$. Hal ini menunjukkan bahwa dapat dikatakan terdistribusi normal dan dapat disebut sampel besar.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
UPD	0,701	1,426	Tidak terjadi multikolinearitas
WEALTH	0,978	1,023	Tidak terjadi multikolinearitas
TK	0,952	1,051	Tidak terjadi multikolinearitas
LVRG	0,953	1,050	Tidak terjadi multikolinearitas
BD	0,698	1,434	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel IV.2 menunjukkan bahwa masing-masing nilai *Tolerance* diatas 0,10 ($> 0,10$) dan masing-masing nilai VIF kurang dari 10 (< 10). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 3

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
UPD	0,399	Tidak ada heterokedastisitas
(Wealth)	0,819	Tidak ada heterokedastisitas
TK	0,129	Tidak ada heterokedastisitas
LVRG	0,439	Tidak ada heterokedastisitas
BD	0,861	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas dalam model regresi tersebut.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0,218	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data Sekunder diolah 2018

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan Runs Test pada tabel IV.5 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dalam penelitian ini yaitu 0,218, nilai tersebut lebih besar dari 5%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi ini.

3.3 Uji Ketetapan Model

Tabel 5
Hasil Uji F

F_{hitung}	Sig	Keterangan
2,595	0,029	Model <i>Fit</i>

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan Uji F pada tabel IV.5 tersebut pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model telah *fit* atau tidak. Hasil dari uji F tersaji dalam tabel IV.5 menyebutkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,029, dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat di simpulkan bahwa seluruh variabel independen dengan model regresi tersebut *fit* dan dapat digunakan atau berpengaruh untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 6

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,308	0,095	0,058	0,057526

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel IV.6 diatas menunjukkan bahwa variabel dependen dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 5,8% nilai tersebut dapat dilihat dari besarnya *Adjusted R Square* 0,058. Kemudian sisanya sebesar 94,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah disajikan dalam bab IV sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Kemakmuran dan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzarsari, Desy. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Armaja, dkk. 2015. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota

- Di Aceh)“. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. ISSN. 2502-6976. Vol. 3, No. 2.
- Artha, Diri Risma., Prayitno Basuki & Alamsyah Mt. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb)”. *Jurnal Infestasi*. Vol. 11. No. 2 h:214 – 229.
- Aziz, Asmaul. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)”. *EKSIS Universitas Islam Majapahit Mojokerto*. ISSN: 1907-7513. Vol. XI, No. 1.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jawa Tengah: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jawa Tengah: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jawa Tengah: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jawa Tengah: BPK RI.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Julitawati, Ebit., Darwanis, dan Jalaluddin, 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, Tahun I, No. 1.\
- Kusuma, Aulia Rizki & Nur Handayani. 2017. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. ISSN: 2302-8556. Vol. 6, No. 1.
- Kusumawardani. Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE YOGYAKARTA
- Maiyora, Gita dkk. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)”. *Jom FEKON,Faculty of Economics Riau University*. Vol. 2 No. 2.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja

- Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Volume 1 (1)
- Masdiantini, Putu Riesty & Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN : 2460-0585. Vol. 14. No. 2.
- McClave, James T, et al. 2011. *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 11. Penerbit: Erlangga. Ciracas, Jakarta.
- Mulyani, Sri & Hardiyanto Wibowo. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)". *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No. 1.
- Noviyanti, Nur Ade & Kiswanto. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Accounting Analysis Journal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*. ISSN 2252-6765. Vol. 5, No. 1.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Santoso, singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo.
- Sari, Indah Puspa, dkk. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan
- Simanullang. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th Edition*. United Kingdom: John Wiley&Sons Ltd.
- Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh leverage, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal. Universitas Negeri Semarang*.
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Ejournal s1.undip.ac.id/index.php/accounting* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP* Vol. 2 (1):39-51.
- Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Edisi pertama. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.